



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN FUNDAMENTAL

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi *template* atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL

Tuliskan Judul Usulan

Mengevaluasi Peran Desentralisasi Fiskal: Analisis Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Daerah

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

Ketimpangan pendapatan merupakan persoalan penting dalam pembangunan ekonomi. Penurunan ketimpangan sering dijadikan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya alam maupun manusia, perbedaan demografi pada masing-masing wilayah sehingga menyebabkan perbedaan pertumbuhan antar daerah. Sebagai upaya mengurangi ketimpangan tersebut pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah dengan sistem desentralisasi yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004. Dalam pelaksanaannya penerapan desentralisasi fiskal juga masih belum terukur keberhasilannya sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam. Atas dasar masalah tersebut penelitian ini bertujuan; (1) Menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal; (2) menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan; (3) memetakan ketimpangan pendapatan dengan indikator penerimaan daerah dan; (4) Menganalisis strategi untuk meningkatkan peran desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang bersifat eksploratif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari BPS, Biro Keuangan, Bappeda Provinsi Jambi dan buku, jurnal dan literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Ruang penelitian ini mencakup kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jambi dengan periode penelitian 15 tahun. Alat analisis yang digunakan diantaranya studi kepustakaan (library reseach) untuk masalah pertama, regresi berganda untuk masalah kedua, tipologi klassen dan cross tabulasi untuk masalah ketiga dan SWOT untuk masalah ke empat. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan informasi mendasar terkait capaian kebijakan desentralisasi fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Target luaran dalam penelitian ini adalah publish pada jurnal ekonomis: Journal of Economics and business eISSN 2597-8829, dan luaran tambahan berupa buku ber ISBN dengan tingkat kesiapan teknologi 2 dengan target akhir kesiapan teknologi 3..

KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata

Desentralisasi fiskal, Ketimpangan pendapatan.

PENDAHULUAN

Penelitian Fundamental merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.000 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- B. Pendekatan pemecahan masalah
- C. *State of the art* dan kebaruan
- D. Peta jalan (*roadmap*) penelitian

LATAR BELAKANG

Ketimpangan antar daerah masih menjadi permasalahan masalah di setiap negara, baik negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Ketimpangan merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi perbedaan ketimpangan pembangunan, penguasaan sumberdaya alam dan perbendaan sumberdaya yang dimiliki antar wilayah. Sebagai upaya mengurangi ketimpangan tersebut maka pemerintah telah menerapkan sistem otonomi daerah dengan ditetapkannya UU.No.33 Tahun 2004, tentang desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dan pembentukan daerah baru.

Implementasi otonomi daerah atau desentralisasi fiskal telah ditandai dengan peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemekaran wilayah yang telah menjadi 11 kabupaten/kota di tahun 2022 dari 6 kabupaten/kota pada tahun 2005. Otonomi daerah dikatakan ideal apabila semua pengeluaran pemerintah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD daerah itu sendiri. Namun kenyataannya PAD hanya merupakan bagian porsi yang kecil dari total pendapatan daerah dan tidak mampu menjadi sumber pendapatan utama. Sehingga kondisi tersebut justru menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi dan tidak sejalan dengan tujuan utama otonomi daerah yaitu pemerataan pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan dan kesejahteraan penduduk antar wilayah dilakukan dengan melihat indeks gini rasio dan besarnya PDRB perkapita pada masing-masing wilayah. Dimana semakin tinggi nilai indeks gini rasio maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi, dan semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam terkait peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan informasi mendalam terkait dampak atau peran dari desentralisasi fiskal terhadap penurunan ketimpangan pendapatan dapat terukur dengan baik, sehingga dapat dijadikan landasan dalam peningkatan kinerja pemerintah kedepan serta apakah sudah sesuai dengan tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

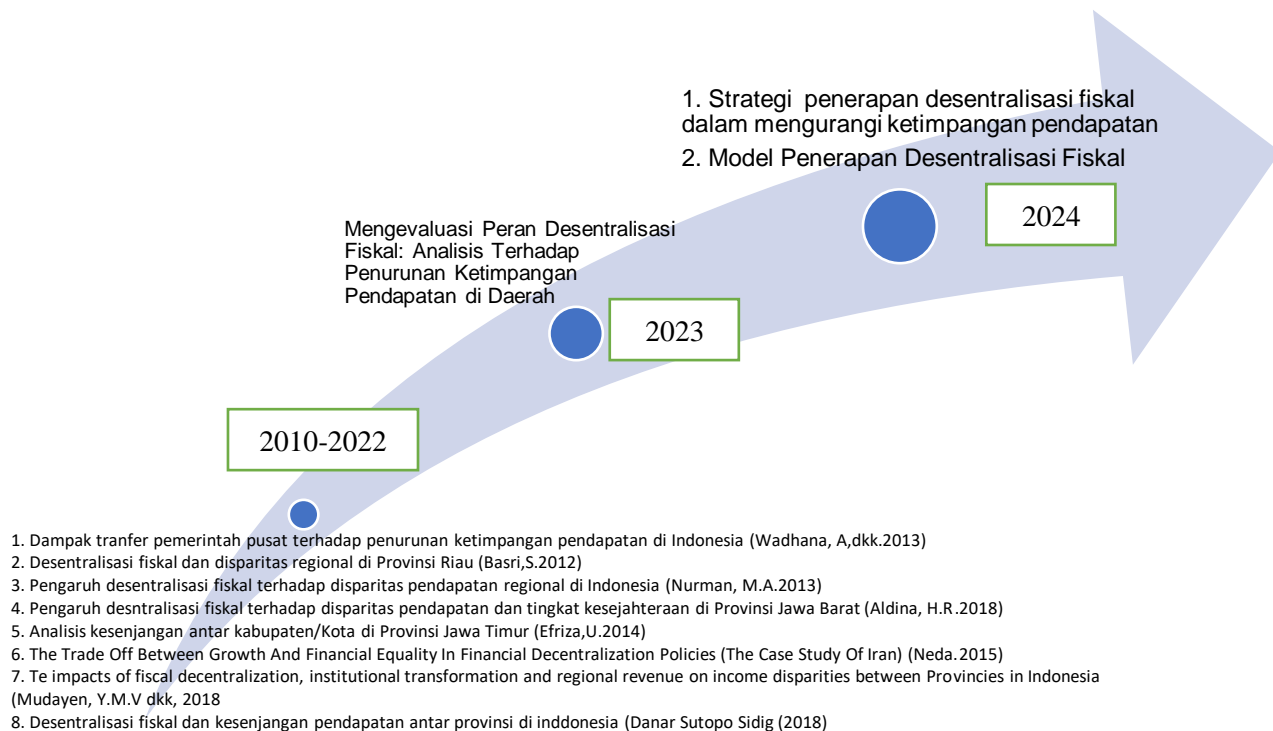
Permasalahan yang diteliti

1. Bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana peran desentralisasi fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan dan penerimaan daerah di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana strategi untuk meningkatkan peran desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi?

State of the art

Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada hasil dari peran dan strategi desentralisasi fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Dalam beberapa, penelitian yang telah dilakukan tidak banyak yang membahas peran desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan terlebih strategi dalam meningkatkan peran desentralisasi dalam menurunkan ketimpangan

Peta Jalan (Roadmap) Penelitian



METODE

Metoda atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1.000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkanyang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang bersifat eksploratif dengan pendekatan library reseach. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bappeda dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi serta instansi terkait lainnya.

Alat Analisis Data

Alat Analisis Untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan studi kepustakaan yang didasarkan pada teori desentralisasi. Sedangkan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan digunakan Indeks Wiliamson (Arsyad,2010). Dimana dasar perhitungannya dengan menggunakan PDRB perkapita ADHK dengan jumlah penduduk per daerah.

$$CV_w = \frac{\sqrt{Yi - Y)^2 fi/n}}{Y}$$

Keterangan :

Vw	=	Indeks Williamson
Yi	=	Pendapatan regional per kapita kabupaten/kota ke-i
Y	=	Pendapatan regional per kapita se provinsi
Fi	=	Jumlah penduduk di kabupaten/kota ke-i
n	=	Jumlah penduduk se provinsi

Dengan kriteria sebagai berikut:

ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson < 0,2

ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara 0,21 – 0,35

ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson > 0,35

Menjawab tujuan kedua yaitu menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan digunakan spesifikasi model ekonometrika yang mengacu dari spesifikasi model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian Nurman (2013), sebagai berikut.

$$DPR = \beta_0 + \beta_1 DAUPK + \beta_2 DBHPK + \beta_3 DAKPK + \varepsilon$$

Keterangan :

DPR = Disparitas Pendapatan Regional

β_0 = Konstanta

DAUPK = Dana Alokasi Umum per kapita

DBHPK = Dana Bagi Hasil per kapita

DAKPK = Dana Alokasi Khusus per kapita

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Standar error

dan selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji F, uji t.

Menjawab tujuan ketiga memetakan kondisi desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan model Tipologi Klassen, yang dikembangkan dengan menggunakan indikator desentralisasi fiskal sebagai proxy pertumbuhan ekonomi dan Penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) sebagai proxy pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah.

Tabel.1. Tipologi Klassen untuk Pengindentifikasian Daerah Tertinggal

Tingkat penerimaan (DAU+DBH+DAK) kabupaten/kota dibandingkan rata-rata kabupaten/kota	Tingkat Penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) kabupaten/kota dibandingkan rata-rata kabupaten/kota	
	Tinggi (>1)	Rendah (<1)
Tinggi (>1)	Kuadran I	Kuadran II
Rendah (<1)	Kuadran III	Kuadran IV

Sumber : Hasil Modifikasi

Model ini membandingkan penerimaan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/PKPD (DAU+DBH+DAK) kabupaten/kota dengan rata-rata kabupaten/kota dan tingkat penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) kabupaten/kota dengan rata-rata kabupaten/kota dan selanjutnya kelompokkan berdasarkan empat kuadran sebagai berikut:

Kuadran I adalah Kabupaten/Kota Maju dan Cepat Tumbuh

Kuadran II adalah Kabupaten/Kota Maju tetapi Tertekan

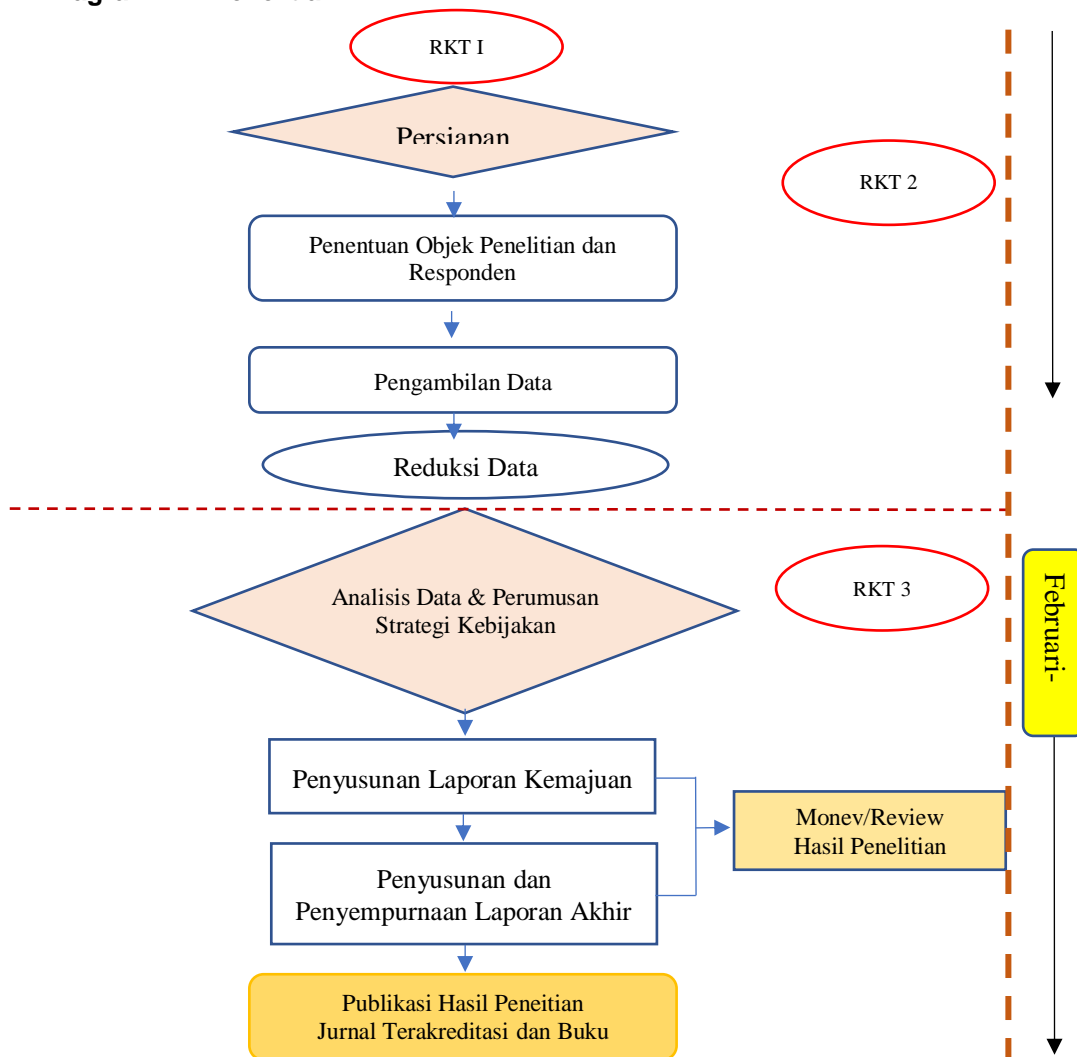
Kuadran III adalah Kabupaten/Kota yang Berkembang Cepat

Kuadran IV adalah Kabupaten/Kota yang Relatif Tertinggal

Selanjutnya dilakukan analisis Cross Tabulation untuk memetakan korelasi antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan.

Dan untuk masalah keempat yaitu menganalisis strategi untuk meningkatkan peran desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan digunakan analisis model SWOT.

Diagram Alir Penelitian



Gambar 3. Rencana kegiatan penelitian (bagan alir)

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian.

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Studi Literatur												
2.	Pengurusan izin untuk pengumpul data												
3.	Pengumpulan data penelitian dan entri data												
4.	Evaluasi data												
5.	Tabulasi, pengolahan dan analisis data												
6.	Penyusunan laporan dan penyempurnaan laporan												
7.	Pembuatan artikel jurnal dan Buku ber-ISBN												
8.	Seminar hasil, penyempurnaan laporan akhir												
9.	Penyerahan hasil laporan												

DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- Undang-Undang, R. I. No. 33 Tahun 2004 tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Anggono, P. (2020). The Effect of Fiscal Balance Funds on Local Economic Growth in Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 6(2).

3. Anggono, P. (2020). The Effect of Fiscal Balance Funds on Local Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2).
4. Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun, 140.
5. Indonesia, P. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Tetya, O. (2010). Analisis Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Doctoral dissertation, Tesis. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia).
8. Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.
9. Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111-118.
10. Basri, S. (2012). Desentralisasi Fiskal Dan Disparitas Regional Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 20(04).
11. Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-200. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 9(1), 1-20.
12. Adlina, H. R. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010-2017.
13. Efriza, U. (2014). Analisis Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
14. Neda, I. G., & Mohammed, S. (2016). The tradeoff between growth and financial equality in financial decentralization policies (the case study of Iran). *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)* ISSN 2356-5926, 1(1), 1256-1267.
15. Mudayen, Y. M. V., & Maridjo, H. (2018). The impacts of fiscal decentralization, institutional transformation, and regional revenue on income disparities between provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 20(3), 247-259.
16. Juanda, B & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. IPB. Press. Bogor.
17. Sidig, D. S. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 978-100.